

# Menjadi Pemilih Cerdas

Dalam sebuah perbincangan di warung kopi, ada seorang kawan berkomentar dalam bentuk pertanyaan: apa susahnya menjadi pemilih dalam pemilihan umum, termasuk Pilkada DKI Jakarta? Bukankah itu pekerjaan yang selesai dilakukan hanya beberapa detik saja?

Kita tentu mempunyai berbagai penilaian atas pertanyaan tersebut. Sebagian dari kita mungkin mengatakan, ini pertanyaan bodoh. Namun, kalau ditelusuri agak serius, pertanyaan ini sebenarnya mengisyaratkan percampuran berbagai kondisi psikologis masyarakat, antara kepedulian untuk ikut pilkada, apatisisme, dan ketiadaan harapan untuk masa depan pascapilkada.

Fenomena demikian lumrah dalam masyarakat. Meski demikian, sebagai bagian dari proses demokrasi yang paling *workable* sekarang ini, keberadaan pemilihan umum (baca: pilkada) tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menjadi prasyarat utama untuk menandai apakah demokrasi terjadi atau tidak. Pilkada dalam konteks ini menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukkan keberkuasaan rakyat atas elitnya. Melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitnya.

Hal inilah yang membedakan antara demokrasi dan nondemokrasi, baik dalam proses pemilihan maupun bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Melalui prosedur ini, rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban atas kinerja sebuah pemerintahan yang berujung pada apakah ia masih layak dipilih lagi atau tidak. Karena itu, kalau kita mengambil sikap abstain (*golput*) dalam sebuah proses pemilihan, meskipun ini juga bagian dari hak warga negara, berarti kita telah mempersilakan diri "disandera" selama lima tahun oleh pemimpin yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Namun demikian, penulis juga bisa memahami jalan berpikir beberapa kalangan yang memilih untuk "tidak memilih".

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana agak Pilkada DKI yang akan dilaksanakan 8 Agustus mendatang tidak sekadar formalitas prosedur demokrasi, tapi lebih dari itu, mempunyai makna untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada jawaban tunggal tentang hal ini. Namun salah satu elemen penting yang bisa dijadikan jawaban adalah mendorong pemilih untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan.

## Perilaku Pemilih

Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas? Sebelum menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita membuat pemetaan kecil tentang perilaku pemilih dalam menentukan pilihan atas seorang kandidat. Dalam ilmu politik, perilaku pemilih (*political behaviour*) ini memang menjadi wilayah studi tersendiri. Secara garis besar perilaku pemilih, dalam konteks Pilkada DKI, dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori: *pertama*, penentuan pilihan karena kasamaan ideologi dengan kandidat. Namun, dalam kehidupan Indonesia sekarang dengan politik aliran semakin cair, ideologi agaknya tidak lagi menjadi faktor determinan, di samping untuk mencari garis persamaan ideologis sekarang ini juga bukan hal mudah karena arus pragmatisme politik yang demikian kuat.

*Kedua*, pilihan didasarkan pada afiliasi partai politik. Kandidat yang didukung partai politik pilihannya, kepada dialah pilihan dijatuhkan. Pemilih yang berperilaku seperti ini agaknya lebih banyak, sehingga para kandidat berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh dukungan partai politik sebanyak mungkin (Bandingkan dengan temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Rasionalitas Pilkada DKI, Mei 2007)

*Ketiga*, pilihan karena kesamaan etnisitas. Banyak yang mengasumsikan, etnisitas akan turut menentukan pilihan politik seseorang, sehingga salah satu kandidat Pilkada DKI menjadikan isu etnisitas (Betawi) sebagai penarik suara. Penulis mempunyai asumsi, meski etnisitas ikut menentukan, tapi dalam Pilkada DKI hal ini tidak terlalu signifikan.

*Keempat*, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. Pragmatisme ini bisa muncul karena banyak hal, seperti politik uang, kedekatan dengan kandidat, dan sebagainya. Politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tapi bisa dalam bentuk-bentuk yang agak *soft* agar tidak dikesankan "membeli" suara. Penulis menduga, pemilih dalam Pilkada DKI banyak yang menempuh cara ini untuk menentukan pilihan.

*Kelima*, pilihan karena program dan integritas kandidat. Pemilih yang rasional biasanya melihat sisi ini. Tapi penulis menduga kuat, tidak banyak pemilih yang menggunakan hal ini sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan.

Memang dimungkinkan, pilihan ditentukan juga karena kombinasi dan perpaduan dari beberapa unsur di atas, namun pemilih yang cerdas seharusnya didasarkan pada rekam jejak kandidat, integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan.

Pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar isapan jempol akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis. Belum lagi adanya anggapan, siapa pun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Meski demikian, ruang kecerdasan dan akal sehat tetap harus dipelihara dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sumber: <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/06/Jabotabe/jab08.htm>

## **Menuju Kampanye yang Mencerdaskan**

Memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI, suhu politik di Jakarta semakin tinggi. Jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dimulai, spanduk dan pamflet bergambar kandidat gubernur dan wakil gubernur sudah bertebaran di hampir setiap sudut Jakarta. Mirip dengan iklan di televisi, masing-masing kandidat berlomba-lomba menawarkan "produk" lengkap dengan janji-janji muluk. Masing-masing mengklaim punya kelebihan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Persoalannya adalah kampanye bukan iklan. Kampanye politik-apalagi untuk kepentingan pemilihan kepala daerah-jauh lebih krusial dan memiliki pengaruh yang lebih luas ketimbang iklan.

Jika konsumen salah memilih produk karena terpicat iklan padahal produknya bermasalah, dampak yang muncul hanya terbatas pada pemakai produk itu. Tetapi, jika rakyat salah memilih pemimpin hanya karena kampanye pemimpin itu lebih memikat dibanding yang lain, akibatnya akan dirasakan juga oleh orang lain yang bahkan tidak memilih pemimpin itu sekalipun.

KPU DKI sebagai pelaksana dan penanggung jawab pilkada memang telah memberikan rambu-rambu tata cara kampanye. Namun, sama seperti iklan yang juga memiliki kode etik, rambu-rambu adalah satu hal dan praktik politik adalah hal yang lain lagi.

Melihat kenyataan bahwa kandidat gubernur dan wakil gubernur sudah berani melakukan kampanye terselubung jauh sebelum dimulai masa kampanye, tidak ada jaminan bahwa dalam pilkada di Ibukota ini tidak akan terjadi pelanggaran. Kemungkinan seperti ini tentu harus diwaspadai, terutama oleh Panwaslu dan KPU DKI, serta seluruh elemen masyarakat sipil, agar pilihan rakyat sebagai pemegang sah kedaulatan tidak ternoda oleh pelanggaran-pelanggaran.

Hal ini perlu ditekankan, karena Pilkada DKI sering disebut sebagai barometer pilkada di Indonesia. Pilkada DKI mestinya menjadi semacam "proyek percontohan" bagi pilkada di berbagai daerah di Tanah Air. Itulah sebabnya, Pilkada DKI diharapkan betul-betul mencerminkan sebuah proses pemilihan yang bersih, terbuka, dan demokratis.

### **Pendidikan Politik**

Pilkada langsung memang hal baru bagi Indonesia. Namun, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai kemungkinan yang dapat mencederai demokrasi. Justru pengalaman pertama ini harus menjadi preseden yang baik agar dapat dicontoh dalam pilkada berikutnya. Di sinilah pentingnya menjadikan momentum kampanye sebagai pendidikan politik bagi rakyat.

Pilkada secara langsung memang memberi peluang besar bagi warga Jakarta untuk belajar demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Dengan pemilihan langsung, warga punya keleluasaan untuk memilih sendiri pemimpin mereka. Pilihan bebas ini secara tidak langsung merupakan pendidikan politik, bahwa mereka punya hak otonom untuk memilih kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani.

Berbeda dengan pilkada di daerah lain, pemilih dalam Pilkada DKI relatif lebih terdidik, sehingga diperkirakan mereka akan menjatuhkan pilihannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional. Asumsi ini-meski tidak sepenuhnya benar-merupakan tantangan bagi kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk lebih mengedepankan jenis kampanye yang mencerdaskan, bukan kampanye yang meninabobokan.

Sentimen komunal bisa saja dipakai sebagai senjata kampanye. Namun, jika hanya mengandalkan sentimen ini untuk meraih simpati warga Jakarta, Pilkada DKI tidak akan jauh berbeda dengan pilkada di daerah lain, yang gampang mengobral emosi komunal tanpa menyentuh visi yang jauh ke depan. Kecenderungan seperti ini tentu akan bertabrakan dengan mayoritas pemilih DKI yang relatif rasional dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

Kenyataan itu memang cukup membesarkan hati. Namun, realitas politik tidak cukup hanya dihadapi dengan kebesaran hati. Pilkada, apalagi untuk wilayah sekomples Jakarta, suka atau tidak suka, adalah perebutan kekuasaan.

Jangankan Pilkada DKI yang sudah pasti memiliki sumber daya yang sangat besar, perebutan kekuasaan di tingkat kelurahan pun diwarnai oleh trik dan intrik, padahal sumber daya yang terdapat di sana sangat terbatas. Dengan iming-iming sumber daya yang besar, tentu para kandidat akan berusaha mendapatkan kursi nomor satu di DKI. Di sinilah politik Machiavellian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Idealisasi kampanye sebagai ajang pendidikan politik bisa berubah total menjadi pembodohan politik.

Kuatnya orientasi komunal dalam Pilkada DKI, yang ditunjukkan dengan jargon-jargon Betawi yang sangat kental, adalah contoh yang layak dicurigai sebagai bentuk halus dari pembodohan politik. Orientasi komunal, menyebabkan orang lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan primordial ketimbang alasan-alasan yang lebih rasional.

Di sisi lain, kecenderungan kandidat kepala daerah memanfaatkan ormas sebagai mesin politik-di samping partai itu sendiri-semakin memperkuat kooptasi komunitas politik atas masyarakat sipil.

Pada akhirnya, lagi-lagi rakyat harus menjadi korban. Sebab, kontrak sosial yang terjadi bukan antara rakyat dan kandidat kepala daerah, tetapi antara kandidat dan partai atau ormas.

## Memperbarui Kontrak Sosial

Disadari atau tidak, kecenderungan tersebut cukup mengkhawatirkan masa depan demokrasi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan kian kehilangan makna. Namun, para kandidat belum terlambat untuk memperbarui kontrak sosial yang selama ini dilakukan dengan cara yang salah. Karena itu, masa kampanye harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk meyakinkan publik Jakarta bahwa ambisi mereka untuk memimpin DKI bukan didasarkan pada sentimen primordial maupun memanfaatkan ormas sebagai mesin politik, tetapi betul-betul didasarkan pada akseptabilitas, kapabilitas, dan integritas.

Tiga hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para kandidat. Akseptabilitas mengandaikan adanya dukungan riil dari sekelompok orang untuk diwakili dalam mengelola Jakarta ini. Mereka maju sebagai cagub dan cawagub bukan semata-mata karena ambisi pribadi, tetapi betul-betul karena ada yang menginginkan mereka. Jika akseptabilitas bisa dipenuhi, persoalan legitimasi dengan sendirinya bisa diatasi.

Namun akseptabilitas saja tidak cukup. Untuk meraih simpati publik Jakarta juga diperlukan kecakapan memimpin dan membangun sinergi dengan berbagai elemen bangsa yang lain, sehingga membentuk sebuah kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Menyangkut kapabilitas kandidat, tidak ada jalan lain kecuali menunjukkan program yang riil dan terukur, sehingga publik dengan sendirinya bisa menilai tingkat kapabilitas kandidat.

Namun harus diingat, akseptabilitas dan kapabilitas hanya mungkin bisa menghasilkan "produk" yang dirasakan warga Jakarta jika dilengkapi oleh integritas. Jika moralitas politik adalah aturan main yang harus ditaati bersama oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses-proses politik, maka integritas adalah kesediaan untuk berpegang teguh dan mematuhi moralitas politik tersebut.

Jika syarat pertama menjawab pertanyaan seberapa besar dukungan publik terhadap cagub dan cawagub, maka syarat kedua menjawab tingkat kelayakan kandidat berdasarkan program yang ditawarkan dan kecakapan yang dimiliki untuk mengelola dan menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan persyaratan ketiga melengkapi dua syarat sebelumnya. Persyaratan ketiga menjawab pertanyaan untuk apa serta untuk kepentingan siapa kekuasaan itu dijalankan. Integritas kandidat pada akhirnya akan menunjukkan seberapa besar komitmen mereka kepada kepentingan publik.

Tanpa akseptabilitas, pemerintahan akan mudah digoyang karena dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sebaliknya, tanpa kapabilitas, pemerintahan hanya akan menghasilkan kinerja yang amburadul. Namun, akseptabilitas dan kapabilitas menjadi tidak ada gunanya jika tidak didukung oleh integritas. Tanpa integritas, pemerintah akan terus melanggengkan dan bahkan menumbuhkan subur subur penyelewengan kekuasaan secara membabi buta.

Materi kampanye para kandidat gubernur dan wakil gubernur mestinya berpijak pada tiga hal ini. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah DKI, harus bisa meyakinkan publik bahwa mereka memiliki ketiga syarat tersebut.

Inilah model kampanye yang mencerdaskan. Keberhasilan kampanye semacam ini ditentukan tidak semata-mata oleh kemampuan masing-masing tim sukses untuk meyakinkan publik Jakarta bahwa kandidat yang mereka usung bukan tokoh tanpa cacat, tetapi terutama oleh jaminan bahwa cacat itu akan terus diperbaiki dan disempurnakan.

Sumber : <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/23/Jabotabe/jab09.htm>

## **PENDIDIKAN POLITIK, PARNPOL DAN PEMILU 2009**

Kampanye untuk Pemilu Legislatif yang akan berlangsung pada tanggal 9 April 2009 telah dimulai sejak hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008. Kampanye ini diikuti oleh 34 Parnpol peserta Pemilu 2009. Kampanye yang dimulai 9 bulan sebelum hari pemilihan ini diharapkan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak KPU dijadikan ajang oleh pihak Parnpol, tidak hanya untuk melakukan sosialisasi tapi juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Bisakah harapan untuk melakukan pendidikan politik yang bertujuan agar Pemilu 2009 bisa berlangsung dengan damai dan menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang absah dan berkualitas itu dibebankan kepada Parnpol belaka. Pengalaman demokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun menyatakan bahwa pekerjaan maha besar tersebut yaitu melakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat Indonesia tidak bisa diserahkan hanya kepada Parnpol saja.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan Indonesian Research and Development Institute (IRDI) sekitar dua bulan yang lalu berkaitan dengan launching survey popularitas calon Presiden, penulis mengusulkan agar pendidikan politik dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh lembaga penelitian. Namun usul penulis ini diprotes oleh profesor Riset Syamsuddin Haris dari LIPI, dia berargumen jika tugas pendidikan politik adalah tugas dari Parnpol semata dan oleh karena itu harus dibebankan kepadanya. Penulis sendiri sangat insyaf mengenai salah satu tugas parpol tersebut yang memang ada hampir di seluruh buku pengantar ilmu politik yang ada baik yang dibuat oleh pengarang luar negeri maupun dalam negeri. Tetapi harus disadari bahwa Parnpol di Indonesia sudah sedari dulu tidak menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang ditekankan oleh para ahli politik, seperti melakukan pendidikan politik, komunikasi politik dan penengah konflik; parpol di Indonesia hanya berperan sebagai alat pencari dan mengakumulasi kekuasaan belaka, oleh karena itu walau saat ini Parnpol sudah diharuskan oleh Undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang Parnpol untuk melaksanakan pendidikan politik tetap saja penulis pesimis, Parnpol akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik dengan baik.

Oleh karena itu bagi penulis keadaan di Indonesia saat ini adalah keadaan yang tidak normal atau Force Major, sehingga tugas melakukan pendidikan politik tidak bisa diserahkan hanya kepada Parnpol namun juga dilakukan oleh aktor lain. Siapakah aktor tersebut ? Jawaban untuk pertanyaan ini saya kira sangatlah mudah, sejak 10 tahun lalu, demokrasi di Indonesia bertahan bukan karena kekuatan Parnpol, tetapi karena kinerja Civil Society yang bekerja tanpa henti terutama di tingkatan akar rumput dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Civil Society lebih efektif dalam melakukan pendidikan politik dikarenakan Civil Society tidak mengharapkan kekuasaan sementara Parnpol di Indonesia setiap kerjanya ditujukan untuk memperoleh kekuasaan.

Yang termasuk civil society dalam hal ini adalah LSM, media, Ormas, termasuk juga lembaga penelitian dan lembaga pemantau independen. Kelompok civil society ini lah yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik menjelang berlangsungnya pemilu 2009.

Penulis masih teringat ketika dulu pada tahun 1980-an ketika itu lembaga penelitian LP3ES yang dimotori oleh Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae dan lain-lain, berusaha melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang berada di bawah kekuasaan rezim otoriter orde baru, saat itu parpol tidak bisa diharapkan karena dikooptasi oleh rezim. Usaha itu cukup berhasil, Majalah Prisma sebagai media LP3ES melakukan pendidikan politik laku keras di masyarakat dan menjadi bacaan wajib tidak hanya oleh para aktivis dan akademisi di kampus tapi juga sampai para pedagang asongan, yang membaca Prisma untuk menemaninya berjualan.

Saat ini kondisinya hampir sama, bedanya jika dulu parpol dikooptasi rezim saat ini parpol dikooptasi oleh elite politik yang membajak parpol untuk menjadi alat memperoleh kekuasaan.

Penulis optimis jika dilakukan dengan masif dan pendekatan yang tepat, maka pendidikan politik yang dilakukan oleh civil society akan berhasil dan bisa mendorong pelebagaan demokrasi yang kokoh di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pendekatan dialog adalah cara yang cukup efektif dalam melakukan pendidikan politik. Untuk pemilu 2009 dialog-dialog dengan warga harus dilakukan secara massal khususnya di tingkat desa di seluruh Indonesia, setiap desa bisa membuat komunitas-komunitas dialog yang beranggotakan sekitar 30-50 orang. Pengorganisasian komunitas-komunitas dialog ini dilakukan oleh kelompok civil society dengan bekerjasama dengan tokoh maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan tingkat desa. Dengan dialog-dialog yang intensif maka rakyat akan semakin terdidik dan mengetahui dengan baik nilai-nilai demokrasi, di mana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi yang prosedural tetapi juga demokrasi yang substansial.